

Fostering Tolerant Religious Education to Prevent Violent
Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 3 | Vol. 2 | 2019

Policy brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan lembaga riset.

CONVEY Indonesia bertujuan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme benuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi Pendidikan Agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinnekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Memelihara Iman: Negara, Pendidikan Agama dan Pencegahan Kekerasan Ekstrimisme di Asia Tenggara

Temuan-Temuan

1. Peran pendidikan agama dalam pencegahan kekerasan ekstrimisme belum sepenuhnya dieksplorasi.
2. Enam negara ASEAN yang diteliti harus mengembangkan upaya bersama dalam mencegah kekerasan ekstrimisme bilamana tidak negara-negara ASEAN dalam region in akan semakin terpolarisasi sepanjang garis agama dan etnis.
3. Pendekatan yang dilakukan Singapura dengan pendidikan nilai di sekolah dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan kerukunan umat beragama dapat dijadikan contoh bagi negara ASEAN lainnya. Muslim dan Non-Muslim diperlakukan sebagai warga negara Singapura yang sama.
4. Meskipun meningkatnya ancaman kekerasan ekstrimisme di wilayah Asia Tenggara, kelompok agama masih menyangkal situasi yang mengkhawatirkan namun bersedia bekerja sama untuk memulai dialog danberdiskusi.
5. Studi ini menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara konstitusi negara bagian dan praktik. Misalnya, negara dengan posisi netral terhadap agama memberikan ruang bagi kelompok agama untuk mengelola pendidikan agama sendiri. Di beberapa negara, posisi netral negara terhadap agama mengarah ke penuntutan terhadap mereka yang berasal dari kelompok agama minoritas.
6. Dominasi kelompok etnis/kelompok agama mayoritas dalam pendidikan agama dan pendidikan nasional lazim.

Latar Belakang

Wilayah Asia Tenggara, yang merupakan rumah dari beragam keyakinan, saat ini sedang menghadapi sejumlah kasus kekerasan ekstrimisme. Pandangan radikal dari doktrin agama digunakan untuk membenarkan aksi-aksi ini. Pada tahun 2017, PPIM melakukan survey pada siswa SMA dan Mahasiswa, terungkap bahwa sejumlah besar dari reponden-responden ini memiliki pandangan yang radikal. Data dari survey ini menunjukkan bahwa 58,5% dari pelajar-pelajar ini cenderung memiliki sikap dan opini yang radikal. Saat mereka ditanya apakah mereka toleran terhadap orang lain, 51,1% dari mereka cenderung intoleran terhadap "orang lain" dalam Islam dan 34,3% intoleran terhadap orang dengan keyakinan agama yang berbeda. Kaum muda telah menjadi pusat dari aksi-aksi kekerasan di negara-negara ASEAN. Salah satunya, pada 2017, Maute bersaudara aktor utama Pengepungan Marawi di Selatan Filipina.. Muhammad Fadly Zainal Abidin, Mahasiswa, Universiti Teknologi Malaysia, yang berusia 23 tahun, tertangkap mencuri motor, untuk berjihad melawan tentara Thai.

Fenomena ini didukung oleh beberapa penelitian yang menggambarkan bagaimana pandangan-pandangan radikal telah menginfiltrasi sekolah dan universitas melalui berbagai faktor : kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (Wahid Foundation, 2016), Guru yang cenderung memiliki pandangan radikal (PPIM, 2016), sistem pendidikan agama yang buruk di sekolah (PPIM, 2019) dan materi-materi dalam buku pendidikan agama yang mengandung pandangan radikal dan eksklusif (PPIM, 2016). Lebih dari itu, penyalahgunaan doktrin agama juga faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya *trend* intoleransi, radikalisme dan kekerasan ekstrimisme (PPIM, 2017) dengan dukungan dari koneksi yang kuat antara intoleransi dan radikalisme yang diyakini oleh para guru. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengatasi meningkatnya radikalisme di kalangan pemuda di Asia Tenggara, menggunakan pembenaran agama mempertaruhkan peran pendidikan agama. Pemeriksaan apakah pendidikan agama adalah faktor yang berkontribusi atau menghambat dalam pencegahan kekerasan ekstremisme perlu segera dilakukan.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di enam negara di Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data. Metode-metode tersebut adalah :

- 1) tinjauan dokumen kebijakan dan buku teks pendidikan agama yang ada
- 2) wawancara mendalam dengan aktor terkait dalam pendidikan agama dan
- 3) diskusi kelompok terfokus mengundang para pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendidikan agama dan implementasinya di sekolah.

Peneliti- dalam urutan abjad

1. Dr. Azmil Tayeb
2. Darwin Absari, MA
3. Debbie Affianty, MA
4. Dorita Setiawan, Ph.D
5. Muhammad Zuhdi Ph.D
6. Dr. Rizwana Abdul Azeez
7. Wilasinie Sopapol, MA

Research Findings

Berdasarkan negara - dalam urutan abjad

Indonesia	Agama kurang unggul dibandingkan dengan nasionalisme seperti yang disebutkan dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, pasal 29: "Negara harus didasarkan pada keyakinan pada yang Esa dan hanya Tuhan, dan Negara menjamin kebebasan beribadah setiap warganya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing	Pendidikan Agama adalah wajib (UU no.20 tahun 2003) Tiga kurikulum berbeda dari pendidikan agama, adalah ; 1) Pendidikan Agama di Madrasah 2) Pendidikan Agama di sekolah umum 3) Pendidikan agama di sekolah yang berafiliasi dengan agama.	Sekolah negeri menyediakan instruksi keagamaan bagi kelompok agama mayoritas dalam cara pengakuan dosa. Toleransi diajarkan secara dangkal
Malaysia	Islam adalah agama resmi federasi tapi agama yang lainnya dapat dipraktikan dengan damai dan harmonis (Article 3 (1)).	Secara teknis, pendidikan agama adalah tanggung jawab negara, tetapi pemerintah federal mengawasi manajemen pendidikan agama. Kementerian pendidikan bertanggung jawab atas pendidikan agama semua sekolah menengah nasional, kementerian mensupervisi kurikulum nasional sekolah-sekolah ini, sementara dewan Islam Negara menetapkan kurikulum untuk semua pelajaran Islam. Negara mewajibkan pendidikan Islam untuk pelajar Muslim sedang kan non-Muslim diwajibkan mengambil pendidikan moral	Pendidikan agama untuk Muslim diajarkan sebagai instruksi keagamaan dan belum secara signifikan menyentuh dan relevan dengan PVE. Namun, nilai-nilai toleransi dan rasa hormat diajarkan bagi non-muslim dalam mata pelajaran pendidikan moral di sekolah.

Myanmar	Mengacu pada konstitusi tahun 2008, agama Budha adalah agama mayoritas (pasal361) , dan negara mengakui agama lain dan (pasal362). Serikat pekerja dapat mendampingi dan melindungi agama itu dan mengakuinya secara menyeluruh (pasal 363). Penggunaan agama untuk tujuan politik dilarang, ujaran kebencian dapat dihukum berdasarkan undang-undang. (Pasal 364).	Pendidikan nasional Myanmar diselenggarakan oleh sekolah pemerintah atau swasta, sekolah dhamma, sekolah yang dipimpin para biksu, monastery dan madrasa. RE belum terinstitusi di sekolah-sekolah publik sedangkan simbol-simbol Budhist sangat dominan di sekolah negeri dan meditasi dilakukan tiap hari.	Konsep RE dan PVE tidak ada di sekolah.Upaya untuk mempromosikan dialog antar-agama dilakukan oleh CSO
Singapura	Singapura menegakan pendidikan agama sekuler sebagaimana tercantum dalam the 1989 White Paper, Maintenance of Religious Harmony, The 1991 White paper)	Pemerintah menorganisir dimana pendidikan agama , sebagai bentuk pendidikan nilai dilaksanakan di ruang beragama, seperti misalnya sekolah Islami paruh waktu, yang diikuti oleh siswa muslim yang mengikuti sekolah pemerintah secara penuh waktu. Untuk sekolah Islami swasta, pendidikan nilai berbentuk silabus yang berbeda dengan sekolah negeri/pemerintah.	Pendidikan Agama di sekolah Islam, mempromosikan seluruh elemen dari konsep-konsep PVE yang relevan, namun, juga termasuk di pendidikan nilai.
Thailand	Konstitusi tahun 1997 menyebutkan tentang dukungan yang sama dari negara bagi semua agama. Namun, tahun 2017, Konstitusi menegaskan Theravada Buddhism sebagai kepercayaan mayoritas.	Instruksi keagamaan diperlukan di sekolah umum, baik di level dasar dan tingkat pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan (MOE) oleh Kantor Dasar Komisi Pendidikan telah merumuskan kursus yang disebut"Studi Sosial, Agama,dan Budaya ", dimana pendidikan agama adalah bagian dari kursus yang diperlukan.	Tema-tema PVE seperti perdamaian dan rekonsiliasi diajarkan dalam sekolah berbasis Islam di daerah konflik di selatan.
Philippines	Konstitusi Filipina tahun 1987 menyatakan bahwa negara memegang prinsip utama pemisahan negara dan gereja. 'Pemisahan negara dan gereja tidak dapat diganggu gugat (pasal II bagian 6) Negara juga mengakui kebebasan dan kesetaraan semua agama dengan mendeklarasikan;" Tidak ada hukum yang dibuat menghormati keberadaan suatu agama atau melarang pelaksanaannya. Kebebasan beragama tanpa diskriminasi dan selamanya harus diperbolehkan. Tidak ada tes agama yang diperlukan untuk latihan sipil atau hak politik (Pasal III, Bagian 5).	Konstitusi tahun 1987 mengizinkan pengajaran agama di sekolah umum sebagai pilihan, baik untuk tingkat dasar ataupun menengah. Kebijakan-kebijakan RE di Filipina dimplementasikan berdasarkan agama mayoritas di suatu area, baik untuk Katolik ataupun Muslim Kelompok Katolik memiliki pengaruh yang signifikan pada kebijakan pemerintah tentang pendidikan, contohnya pengintegrasian RE dalam dalam sistem pendidikan Filipina walaupun konstitusi telah menegaskan bahwa negara adalah sekuler.	RE berbentuk pendidikan nilai dan instruksi keagamaan. Dan tema-tema PVE belum terintegrasi di dalam mata pelajaran.

Rekomendasi-Rekomendasi

OTORITAS SEKOLAH	Kementerian Pendidikan dan Kementerian Urusan Agama	ASEAN
<p>Untuk membekali siswa dengan pemahaman akan kosa kata keimanan yang eksis di komunitas mereka.</p> <p>Untuk memperbanyak interaksi antar etnik dan agama, misalnya pengenalan tempat-tempat ibadah dan kantong-kantong etnis.</p>	<p>Membuat upaya bersama dalam menciptakan dialog untuk mengembangkan pendidikan dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat untuk meminimalkan perpecahan yang mungkin ada di suatu negara. Memperbaiki silabus pendidikan agama untuk memasukkan komponen tentang perbandingan agama dan membangun modul untuk keaksaraan Inter (agama) dan Dialog antar (antar) agama dalam kurikulum pelatihan guru, dan mengatur seminar wajib pelatihan tentang perbandingan agama yang ada untuk guru yang ada.</p>	<p>Melanjutkan dialog regional diantara negara-negara Asia Tenggara dalam menangani konflik-konflik sosial keagamaan yang dihadiri oleh perwakilan tiap tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan.</p> <p>Memperkuat upaya regional diantara negara-negara Asia Tenggara dalam mengeksplorasi peranan pendidikan agama dalam mencegah kekerasan ekstrimisme di Asia Tenggara.</p>

Rekomendasi untuk pemerintah negara tertentu yang diteliti:

1. Di Indonesia, pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk mengawasi agama kurikulum pendidikan di sekolah swasta. Hal ini penting untuk memastikan relevansi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional. Juga, Pemerintah perlu memperkenalkan kembali "Memahami agama" ke kurikulum, agar siswa dapat memahami adanya agama yang berbeda. Jalan yang harus diambil adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan, bukan pendidikan agama.
2. Di Malaysia, sangat penting bagi Departemen Pendidikan untuk bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk mengatasi masalah yang terkait dengan sekolah-sekolah agama informal dengan memiliki silabus standar yang memasukkan pelajaran tentang inklusifitas, pluralisme, dan empati antar agama.
3. Dalam kasus Filipina, pemerintah harus menugaskan kelompok dari tiap kelompok denominasi keimanan, seperti Katolik, Muslim, Protestan, dan glesia ni Kristo untuk membuat modul lebih dapat diterima oleh semua siswa yang datang dari beragam latar belakang agama. Kurikulum nasional tentang pendidikan nilai harus mencerminkan nilai-nilai tradisional Filipina termasuk Islam untuk mempromosikan persatuan nasional.
4. Dalam kasus Thailand, Kementerian Pendidikan Thailand harus memasukkan informasi bias mengenai ancaman dan terorisme di buku teks. Pemerintah Thailand harus menyebar dan menerapkan kebijakan di sekitar pencegahan Ekstrimisme Kekerasan di daerah lain di Thailand, bukan hanya daerah yang terkena dampak dari konflik.
5. Dalam hal Myanmar, Kementerian Pendidikan harus mereview dan mereformasi kurikulum untuk sensitivitas konflik, perspektif yang lebih seimbang, dan promosi budaya perdamaian.
6. Dalam hal Singapura, para pendidik dari sektor pemerintah dan swasta memiliki pesan mendasar yang sama dan dapat menjangkau seluruh siswa di Singapura.

Tentang PPIM UIN Jakarta

Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) adalah lembaga penelitian otonom di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini PPIM adalah pusat studi strategis berbasis universitas di Indonesia dengan pengalaman dalam studi agama dan sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, di dalam negeri dan internasional.

Tentang Penelitian 'Peran Pendidikan Agama dalam Mencegah Kekerasan Ekstremisme di Asia Tenggara '

PPIM UIN Jakarta and United Nations Development Program (UNDP) Indonesia melakukan penelitian tentang "Peran Pendidikan Agama Dalam Mencegah Kekerasan Ekstremisme di Asia Tenggara" dengan mencermati hubungan antara negara dan agama, kebijakan negara mengenai pendidikan agama dan peran pendidikan agama dalam mencegah kekerasan ekstremisme. Terdapat 6 negara yang diteliti, yaitu; Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, the Philippines dan Myanmar. Terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu; wawancara mendalam, tinjauan dokumen dan diskusi kelompok fokus. Data dikumpulkan di bulan September 2018.



**Fostering Tolerant Religious Education to
Prevent Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.
Resilient nations.*